

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kebijakan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil program di wilayah tersebut. Pada kebijakan program KB dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program KB dilihat dari:
 - a. Kebijakan pembentukan Kelembagaan yang menangani program KB di Kabupaten Lampung Tengah sudah sejak awal otonomi terbentuk. Meskipun ada perubahan namun perubahan itu hanya pada penambahan kewenangan dan nama lembaga yaitu dari Badan KB dan PP menjadi Badan KB, PP dan PA.
 - b. Kelembagaan yang menangani program KB di kabupaten Lampung Barat berbentuk Badan baru pada tahun 2010 yang sebelumnya berbentuk Kantor.
 - c. Rasio PLKB terhadap desa di kabupaten Lampung Tengah adalah 2-3 desa, sementara di Lampung Barat rasio PLKB adalah 7-8 desa.
2. Hasil pelaksanaan Program KB dapat di lihat dari:
 - a. penurunan TFR yang ada di wilayah tersebut. Untuk di Kabupaten Lampung Tengah adalah 2,5 kelahiran per wanita usia subur dengan perentasi yang ber KB sebanyak 64,4 %. Hal ini merupakan hasil dari suatu proses yang dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten, untuk

meningkatkan kesertaan ber-KB dan secara terus menerus menjadi peserta KB sehingga berdampak pada penurunnya angka kelahiran

- b. Angka Kelahiran di kabupaten Lampung Barat adalah 2,78 kelahiran per wanita usia subur dengan kesertaan ber-KB 67,6 %. Kesertaan ber KB di Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah, namun hal ini kurang memberi kontribusi terhadap TFR di Lampung Barat, salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah peserta KB yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagian besar menggunakan Suntik (65,9 %) dan pil 20,1%. Dari Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi.

5.2 Saran

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah suatu hal yang harus dilaksanakan di suatu wilayah. Pengendalian penduduk melalui program KB dengan pembentukan badan KB daerah yang khusus menangani program KB sehingga SKPD tersebut fokus pada pelaksanaan program KB, dengan melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penggarapan.
2. Petugas Lapangan sebagai ujung tombak pada pelaksanaan program KB, keberadaannya seharusnya dipertahankan baik secara kualitas maupun kuantitas atau rasionya terhadap jumlah desa yang ada
3. Pelaksanaan Program KB seharusnya terus menerus ditingkatkan di setiap wilayah baik dari sisi sarana maupun prasarannya sehingga hasil

programnya dapat dirasakan, mengingat keberhasilan program KB tidak terlihat pada jangka pendek.